

Transformasi Sosial melalui Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Studi Kasus Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Rostiena Pasciana^{1*}, Lia Juliasih^{2*}, Ieke Sartika Iriany³, Mila Karmila⁴, R. Ismira Febrina⁵

^{1,2,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut, ³Pascasarjana Universitas Garut, ⁵Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informasi Universitas Garut; ¹rostiena_pasciana@fisip.uniga.ac.id, ²liajuliasih@fisip.uniga.ac.id, ³sartikaieke@gmail.com, ⁴milakarmila14@fisip.uniga.ac.id, ⁵ismirafebrina@uniga.ac.id

*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim: 25 Agustus 2024

Artikel Diterima: 12 Desember 2024

Artikel Dipublikasikan: 31 Desember 2024

Abstrak: Penelitian ini didasarkan pada pentingnya upaya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender, khususnya di tingkat desa di mana perempuan sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses dan peran dibandingkan laki-laki. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pengembangan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kalurahan Wedomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan peran perempuan di tingkat desa. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini menggali proses pemberdayaan dan pengembangan kapasitas yang dilakukan dalam program DRPPA. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kalurahan Wedomartani telah berhasil memenuhi seluruh target indikator yang ditetapkan oleh program DRPPA, menjadikan program ini sebagai model pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan, yang mampu mendorong partisipasi perempuan secara signifikan dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: DRPPA, Kapasitas, Pemberdayaan, Perempuan

Abstract: This study is based on the importance of women's empowerment efforts to achieve gender equality, especially at the village level, where women often face limitations in access and roles compared to men. This study seeks to examine how women's capacity development and empowerment in the Women-Friendly and Child-Caring Village (DRPPA) program in Wedomartani Village, Sleman Regency, Yogyakarta, can contribute significantly to increasing women's capacity and roles at the village level. Using a qualitative approach through case studies, this study investigates the empowerment and capacity development processes carried out in the DRPPA program. The study results revealed that Wedomartani Village has succeeded in meeting all the target indicators set by the DRPPA program, making this program an effective and sustainable empowerment model that can encourage women's participation in village development significantly.

Keywords: Capacity, DRPPA, Empowerment, Women

1. Pendahuluan

Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan panduan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs mencakup beragam isu yang saling berhubungan. Salah

satu aspek yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya mencapai SDGs adalah pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dapat diwujudkan melalui pemberdayaan perempuan sehingga peran dan akses perempuan bisa sejajar dengan laki-laki di semua bidang. Pemberdayaan perempuan diharapkan dapat meningkatkan potensi diri perempuan (Nurazizah, 2021). Kesetaraan gender merupakan masalah kompleks yang sulit dipecahkan. Akses pendidikan dan pemberdayaan terhadap perempuan melalui pengembangan kapasitas diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perempuan (Azizah, Luaylik, Saputri, & Pamekasan, 2023; Khusna & Sari, 2024).

Pengembangan kapasitas merupakan suatu proses dan bukan suatu produk (Morrison, 2003; Solehudin, Andriyanto, & Alfirdaus, 2023). Pengembangan kapasitas, sebelumnya lebih fokus pada pengetahuan dan keterampilan individu, tidak melihat dampak organisasi setelah individu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Pelatihan bukanlah pengembangan kapasitas, meskipun pelatihan tentu saja merupakan salah satu komponennya. Pengembangan kapasitas dapat dilihat sebagai proses untuk mendorong atau menggerakkan perubahan multilevel pada individu, kelompok, organisasi, dan sistem. Idealnya, pengembangan kapasitas berupaya untuk memperkuat kemampuan adaptasi diri orang dan organisasi, agar mereka dapat menanggapi lingkungan yang berubah secara berkelanjutan (Morrison, 2003). Untuk mewujudkan peran penting perempuan dalam keluarga dan masyarakat maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) membuat program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang dimulai dari tingkat desa karena desa merupakan wilayah administratif terkecil di Indonesia (Aryatie, Thalib, & Usanti, 2022). DRPPA merupakan konsep pembangunan yang mengutamakan keamanan dan kesejahteraan perempuan serta anak (KEMENPPPA, 2020)(Perempuan, 2001).

Program DRPPA menetapkan 33 provinsi dan 68 kabupaten kota (Indonesia, 2021) (Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak, 2021) . Salah satu provinsi lokasi *pilot project* DRPPA adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diluncurkan pada Tahun 2021. Pemberdayaan perempuan di DIY sebenarnya telah lama dilakukan sebelum muncul program DRPPA. DIY gencar melaksanakan program Desa Mandiri Budaya yang terdiri dari empat pilar yaitu desa budaya, desa wisata, desa preneur dan desa prima. Masing-masing pilar mendapatkan pembinaan dari dinas terkait, yaitu Desa Budaya oleh Dinas Kebudayaan, Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata, Desa Preneur oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Desa Prima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

(DP3AP2). Untuk itulah, pemberdayaan perempuan di DIY sebenarnya sudah lama dijalankan oleh DP3AP2 melalui program Desa Prima sejak Tahun 2008.

Terdapat dua kabupaten yang menjadi lokasi *pilot project* di DIY yaitu Kabupaten Sleman di kalurahan Wedomartani dan Pandowoharjo, serta Kabupaten Kulonprogo di Kalurahan Banjarharjo dan Tanjungharjo. Penetapan 4 lokasi *pilot project* berdasarkan status Desa Prima yang sudah disandang oleh keempat desa tersebut sehingga program DRPPA diharapkan dapat terus berjalan karena desanya sudah siap secara budaya. Kesadaran, komitmen dan kemandirian mereka menjadi modal untuk terus menjamin keberlangsungan program.

Kabupaten Sleman mendapatkan penghargaan Daerah Ramah Perempuan Dan Layak Anak (DRPLA) (Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2023 Tentang Penerima Penghargaan Daerah Perempuan Dan Layanan Anak Tahun 2023, 2023) (KEMENPPPA, 2020). Dari 7 kabupaten/kota penerima penghargaan DRPLA, hanya Kabupaten Sleman yang menjadi lokasi *pilot project* DRPPA. Selain itu, Kabupaten Sleman juga pernah mendapatkan penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) dan KLA (kabupaten Layak Anak) (*Yogyakarta Raih Penghargaan Sebagai Daerah Ramah Perempuan Dan Layak Anak*, 2023). Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sleman juga pernah menerima penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas komitmennya dalam penyelenggaraan perlindungan anak Tahun 2020 (Pranyoto, 2020).

Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman sebagai salah satu lokasi *pilot project* program DRPPA sudah memenuhi hampir semua indikator DRPPA (Zulfikar, 2023). Program pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan misalnya, perempuan dipacu untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan dapat menyelesaikan isu pengasuhan anak, isu kekerasan, pekerja anak, dan perkawinan anak (Pranyoto, 2020).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan lebih melihat pada konteks peran perempuan dalam pembangunan, ekonomi atau kewirausahaan yang bukan merupakan bagian dari program DRPPA. Beberapa penelitian di antaranya adalah; pertama, penelitian Suriani Nur yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan kapasitas perempuan harus terus dilakukan agar perempuan percaya diri untuk berkibrah dalam semua sektor pembangunan di Indonesia (Nur, 2016).

Kedua, penelitian berjudul "Pengembangan Kapasitas Kaum Perempuan Melalui Coaching Femalepreneur di Kabupaten Trenggalek" yang ditulis oleh Solehudin dkk. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan kapasitas perempuan didorong melalui

pelatihan dan pendampingan agar melahirkan perempuan mandiri yang dapat mendorong perekonomian dalam keluarga (Solehudin et al., 2023).

Ketiga, penelitian berjudul “Desa Ramah Perempuan : Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa Sumberpakem dalam Implementasi *SDG's*” yang ditulis oleh Puspaningrum dkk Hasil penelitiannya menyatakan bahwa program DRPPA merupakan perwujudan sasaran *SDG's* kelima yaitu pelibatan perempuan dalam pembangunan melalui Program Pengabdian Kemitraan (PPK) dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan desa serta aparat pemerintahan desa melalui tahap penyadaran dan tahap *capacity building* individu dan kelompok (Puspaningrum & Sunartomo, 2022).

Keempat, penelitian berjudul “Proses Pemberdayaan Perempuan pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta)” yang ditulis oleh Nurlatifah dkk. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dapat dikembangkan melalui pelatihan kepemimpinan melalui proses belajar yang menghadirkan fasilitator. Melalui pemberdayaan ini, perempuan bisa mengoptimalkan peran strategisnya dalam pembangunan (Nurlatifah, Sumpena, & Hilman, 2020).

Kelima, penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Sukoharjo” yang ditulis oleh Defi Agustin dkk. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dapat diciptakan melalui pelatihan yang mengedepankan hubungan emosional sesama anggota kelompok sehingga tercipta kepercayaan dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan kegiatan (Luthfitah, Nurhadi, & Parahita, 2023).

Keenam, penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Bank Sampah Ngudi Makmur Dusun Serut, Desa Ponjong, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditulis oleh Arifka Maulida Nurazizah. Hasil penelitiannya menyampaikan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap penyadaran, tahap perubahan kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan. Kegiatan pemberdayaan melibatkan fasilitator dan instansi pemerintah (Nurazizah, 2021).

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah tema penelitian yang sama-sama membahas pemberdayaan perempuan. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokus penelitian. Lokus penelitian sebelumnya adalah pemberdayaan perempuan pada program-program seperti pembangunan dan ekonomi atau kewirausahaan. Sementara pada penelitian ini, lebih menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan dalam program DRPPA. Lokus penelitian juga berbeda karena penelitian ini mengambil lokus pada lokasi *pilot project* program DRPPA. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pemberdayaan perempuan

dalam program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi di Yogyakarta?”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program DRPPA di Kalurahan Wedomartani. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggali informasi tentang proses pemberdayaan perempuan dan pengembangan kapasitasnya pada program DRPPA yang sudah dilakukan di Kalurahan Wedomartani. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pokok yaitu aparat pemerintah Kalurahan Wedomartani, pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan pimpinan organisasi perempuan yang ada di Kalurahan Wedomartani, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program DRPPA.

2. Implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kalurahan Wedomartani

Kalurahan Wedomartani terletak di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, terbentuk dari 4 kelurahan lama dan 25 Padukuhan. Kalurahan lama tersebut antara lain Kelurahan Lama Babadan, Kelurahan Lama Pokoh, Kelurahan Lama Gedongan dan Kelurahan Lama Krapyak.

Keberhasilan program DRPPA telah ditetapkan oleh KemenPPA sebanyak 10 indikator, yaitu (1) Pengorganisasian perempuan dan anak, (2) Penyusunan data desa yang memuat data pilah perempuan dan anak. (3) Peraturan desa tentang Desa ramah perempuan dan peduli anak, (4) Adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, (5) Keterwakilan perempuan di struktur desa/kelurahan, BPD, Lembaga kemsyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa, (6) Persentase perempuan wirausaha yang berspektif gender di desa, (7) Pengasuhan yang baik berbasis hak anak, (8) Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), (9) Tidak ada pekerja anak (menurunnya jumlah anak di bawah usia 12 tahun yang bekerja) dan (10) Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (KemenPPA, 2023).

2.1. Organisasi Perempuan dan Anak

Kalurahan Wedomartani sudah mempunyai 17 organisasi perempuan dan anak yaitu: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi dan Konseling-Remaja (PIK-R), Karang Taruna, Forum Anak Kalurahan, Lembaga Pendidikan,

Sanggar Kesenian Anak, Sekolah Olahraga, Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (Relawan SAPA), Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Satgas Anti Narkoba.

Organisasi perempuan dan anak yang menitikberatkan pada permasalahan sosial dan keluarga di antaranya PKK, PUSPAGA dan PIK-Remaja. Keberadaan organisasi perempuan di Kalurahan ini sudah berjalan baik, misalnya PKK sebagai organisasi perempuan yang sudah lama ada di Kalurahan Wedomartani. Permasalahan sosial yang menyangkut perempuan dan anak merupakan hal yang seringkali dibenahi. Misalnya pernikahan anak di bawah umur, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak yang tidak sekolah, anak yang terlibat narkoba maupun kenakalan remaja. Pemerintah desa selalu bersinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi bahkan dengan lembaga non pemerintah.

Tidak hanya PKK, PUSPAGA yang mulai berdiri Tahun 2021 juga *concern* terhadap pembinaan keluarga khususnya memberikan pendidikan, pengasuhan dan keterampilan menjadi orangtua, keterampilan mendidik dan melindungi anak maupun menyediakan konseling bagi anak dan keluarga. Mekanisme penyelesaian kasus di PUSPAGA sendiri diawali dari pelaporan yang diterima oleh tim PUSPAGA untuk kemudian disampaikan lebih lanjut kepada konselor dari berbagai pihak. Konselor bisa dari pihak Puskesmas (psikolog) atau Babinkamtibmas. Saat ini, Kabupaten Sleman mempunyai PUSPAGA tingkat kabupaten dan 17 PUSPAGA kalurahan di antaranya Kalurahan Wedomartani. Pelatihan yang diberikan pada para konselor PUSPAGA di antaranya mekanisme dan tahapan dalam melakukan konsultasi serta proses komunikasi dan konsultasi agar para konselor dapat melakukan pendampingan terhadap klien secara baik.

Organisasi perempuan dan anak yang fokus pada perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah Satgas PPA, Relawan SAPA dan Satgas Anti Narkoba. Satgas PPA hadir untuk memberikan pendampingan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pendampingan atau perlindungan anak. Satgas PPA Kalurahan Wedomartani dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 86 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dengan jumlah satgas sebanyak 28 orang dari berbagai unsur masyarakat di antaranya kepala desa, Babinkamtibmas, Kabag kemasayakatan, tokoh masyarakat, HIMPAUDI, PAUD, PKK Desa, Bidan Desa, Kader Desa, Karang Taruna dan Forum Anak (Silvia, 2023).

Satgas PPA yang berdiri sejak Tahun 2021, berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak dengan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Satgas PPA seringkali berkoordinasi dengan PUSPAGA, walaupun masing-masing punya peran yang hampir sama tapi berbeda. PUSPAGA lebih menitikberatkan perannya pada pendampingan keluarga,

sedangkan Satgas PPA lebih menitikberatkan pada pendampingan anak di dalam keluarga. Mekanisme pelaporan yang dibangun antara PUSPAGA dan Satgas PPA sama yaitu masing-masing tim menerima pelaporan untuk kemudian ditindaklanjuti ke lokasi korban. Kedua tim melakukan pemetaan masalah, konfirmasi kepada klien untuk kemudian melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti keluarga, sekolah, ataupun dinas pendidikan untuk mencari dan mendapatkan solusi.

Relawan SAPA merupakan masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kesiapan untuk memberdayakan perempuan dan perlindungan anak di daerahnya. Relawan SAPA fokus pada upaya pemberdayaan perempuan misalnya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan atau pendidikan dalam rangka pembuatan usaha kelompok perempuan.

Selanjutnya, organisasi perempuan yang fokus pada ekonomi adalah Desa Prima, PRSE dan KWT. Desa Prima atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Prima merupakan kelompok wirausaha perempuan yang fokus pada program pemberdayaan perempuan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas diri mereka melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk kesejahteraan keluarga, masyarakat maupun bangsa. Dalam program ini kelompok perempuan Desa Prima mendapat stimulus dana keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah daerah DIY.

Kalurahan Wedomartani sudah menyandang predikat Desa Prima sejak tahun 2011, untuk kemudian dilakukan update data kepengurusan pada tahun 2020. Kelompok wirausaha perempuan ini terlibat aktif dalam kegiatan kabupaten dan provinsi seperti mengikuti pameran. Kalurahan Wedomartani, mempunyai 1 kelompok ekonomi produktif yang bernama Kelompok Kartini. Kelompok ini terdiri dari 41 jumlah pelaku usaha dan 12 jumlah produk.

Tabel 1. Kelompok Ekonomi Produktif Prima Kelompok Kartini Kalurahan Wedomartani

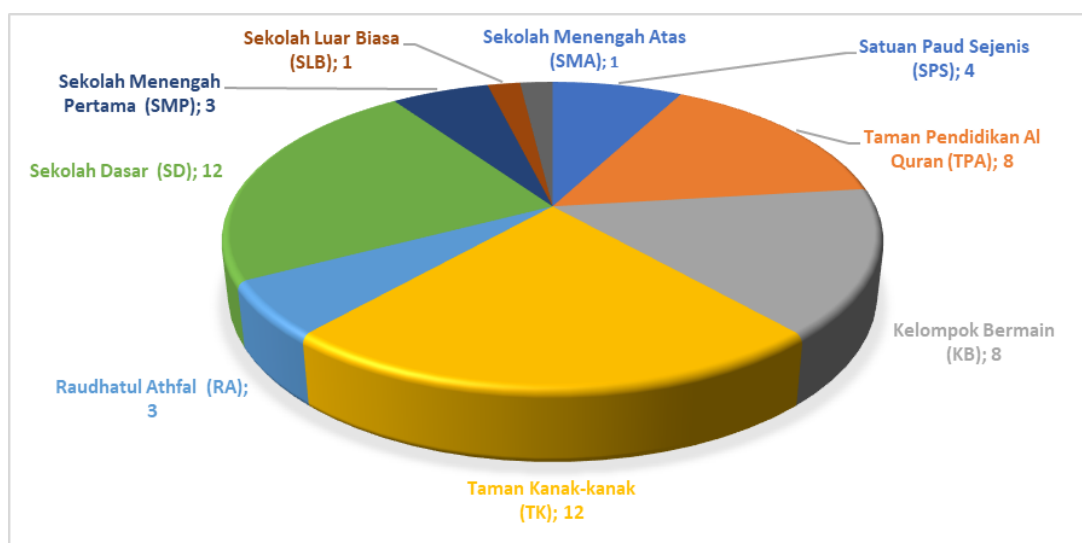
No	Nama	Nama Produk	Jenis Usaha
1	Etyk Etiawati	Cempal ayam	Kerajinan dan aksesoris
2	Hastuti Setyaningrum	Ecoprint (Jogjacraft Souvenir)	Kerajinan dan aksesoris
3	Tugiyem	Jenang Aneka Rasa	Makanan dan Minuman
4	Sofyani Mirah	Tepung Pisang Bananania	Makanan dan Minuman
5	Sofyani Mirah	Granola Pisang Bananania	Makanan dan Minuman
6	Sofyani Mirah	Bananania	Makanan dan Minuman
7	Irna Rianingrum	Aima Bakery	Makanan dan Minuman
8	Irna Rianingrum	Manisan Tomat Hena	Makanan dan Minuman
9	Sri Rahayu	Jamune Biyung	Makanan dan Minuman
10	Agnes Wiwik Wigati	Yu Temu	Makanan dan Minuman
11	Ristianingrum	Emping Jagung Rosha	Makanan dan Minuman
12	Siti Muryanti	Beras Merah	Makanan dan Minuman

Sumber : Daftar Produk Desa Prima (*Daftar Produk Desa Prima, 2024*)

Organisasi perempuan lain yang fokus pada ekonomi adalah PRSE. Sasaran organisasi ini adalah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dengan berbagai alasan seperti

suaminya meninggal, sakit atau tidak bekerja. PRSE memberikan pembekalan keterampilan agar mereka dapat menghidupi keluarganya dengan keterampilan yang dimiliki. PRSE juga mempunyai program arisan bahkan simpan pinjam yang diadakan untuk internal anggota PRSE.

Organisasi perempuan dan anak yang fokus pada pelayanan kesehatan adalah Posyandu Balita dan Posyandu Remaja. Sedangkan organisasi perempuan dan anak lainnya adalah Karang Taruna, Lembaga Pendidikan, Sanggar Kesenian Anak, Sanggar Olahraga Dan Forum Anak Kalurahan. Lembaga Pendidikan di Wedomartani sudah tersedia mulai dari Pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan Pendidikan sekolah tingkat atas (SMA) sebagaimana terlihat di Gambar 1.



Gambar 1. Fasilitas Lembaga Pendidikan di Kalurahan Wedomartani
Sumber : Laporan DRPPA Kalurahan Wedomartani, Tahun 2023 (Wedomartani, 2023)

Adapun sanggar kesenian anak yang disediakan di Kalurahan di antaranya latihan gamelan atau festival dolanan anak. Anak-anak difasilitasi sarana prasarana untuk mempelajari budaya daerahnya. Kalurahan Wedomartani juga mempunyai beberapa sekolah olahraga misalnya sekolah olahraga bola volley, futsal dan panahan. Pada bulan Juni 2024, tim olahraga panahan merebut juara tingkat kabupaten dan nasional. Sekolah olahraga telah berhasil mencetak prestasi yang membanggakan. Potensi anak-anak dapat dimaksimalkan melalui sekolah olahraga.

Terakhir, Forum Anak Kalurahan yang sudah terbentuk di Kalurahan Wedomartani sejak tahun 2018. Forum anak merupakan wadah untuk anak-anak dan remaja (usia 13-18 tahun) di Kalurahan Wedomartani untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam kegiatan sosial, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Forum ini bertujuan untuk mempromosikan hak-hak anak dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Forum ini juga aktif

mengadakan kegiatan khusus anak dengan fasilitas anggaran yang disediakan dari pihak kalurahan seperti mengadakan festival anak, kumpul bocah maupun mengelola tanaman hidroponik yang disediakan lahannya di sekitar kalurahan. Forum anak ini mulai gencar pada masa pandemi. Pada masa itu, mereka bekerja sama dengan Yayasan Sekretariat anak Merdeka Indonesia (SAMIN) yang *concern* pada fasilitasi pengembangan anak dan pengembangan lingkungan sosial budaya dan politik yang kondusif bagi pengembangan kapasitas anak.

2.2. Penyusunan Data Pilah Perempuan dan Anak

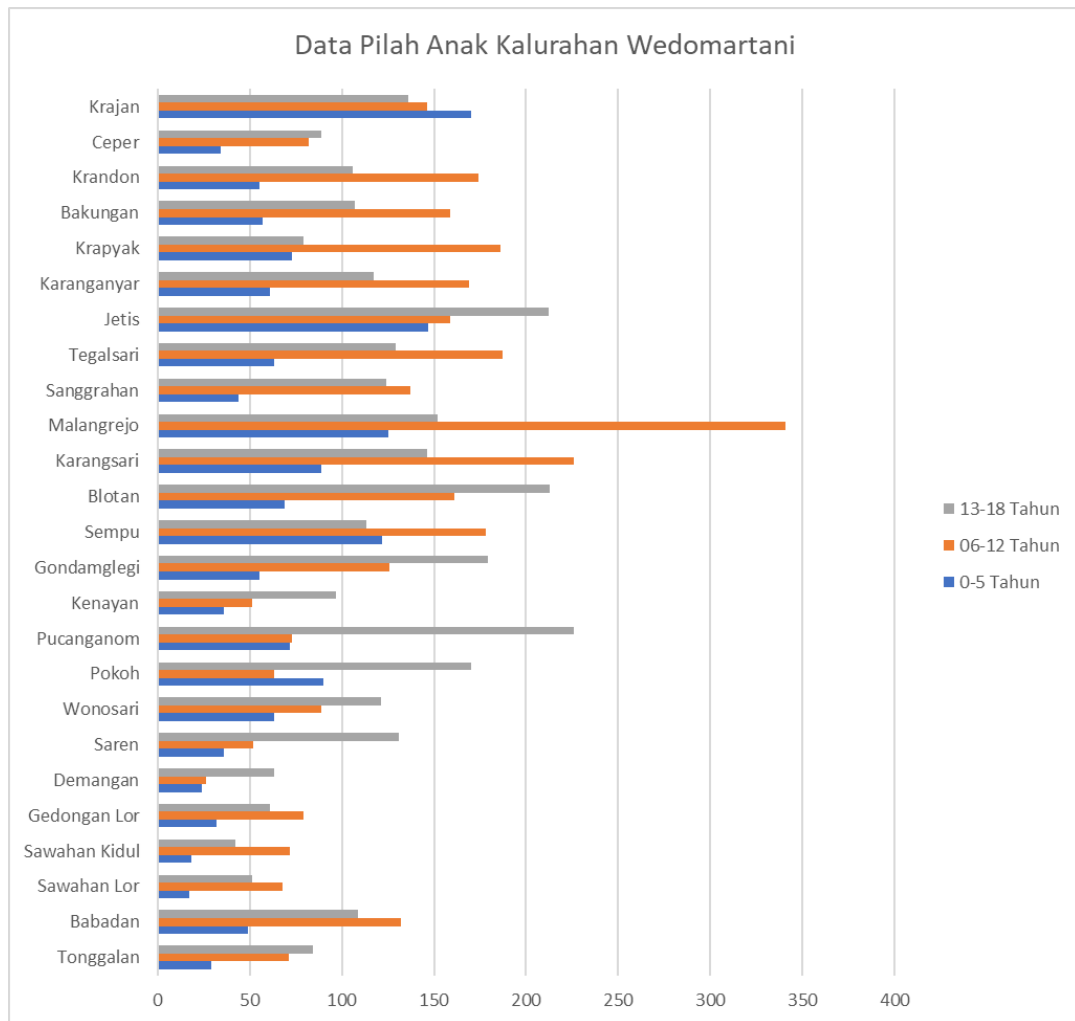
Pada Juni Tahun 2024, data pilah kalurahan Wedomartani meraih juara 3 Nasional Penghargaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu) Konvensional (*Rumah Dataku Kalurahan Wedomartani Juara 3 Tingkat Nasional, 2024*). Data yang tersedia di Rumah DataKu terdiri dari lebih dari 80 jenis data terpilah, yang mencakup berbagai aspek kependudukan dan informasi keluarga. Rumah DataKu telah berhasil melakukan pendataan yang akurat dan riil sehingga dapat mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Data yang detail dan lengkap membantu pengambilan keputusan yang berbasis pada informasi yang komprehensif dan akurat, sehingga program-program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Masyarakat dapat dengan mudah mengakses data yang tersedia melalui display yang disediakan di Kalurahan Wedomartani. Selain itu, Rumah DataKu juga dapat diakses secara online melalui Website Kalurahan di wedomartani.slemankab.go.id pada menu Rumah DataKu.

Sejak dinobatkan sebagai Kampung KB pada tahun 2020, Kalurahan Wedomartani terus mengembangkan Rumah DataKu sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran informasi kependudukan di tingkat mikro. Peran Rumah DataKu menjadi sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan data yang akurat, tidak hanya untuk mendukung pembangunan di Kampung KB, tetapi juga untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan di desa/kelurahan secara keseluruhan.

Data pilah berdasarkan jenis kelamin ; laki-laki 17.473 (49,71%), dan perempuan 16.953 (48,23 %). Data pilah berdasarkan pekerjaan, mayoritas perempuan lebih banyak bekerja sebagai karyawan swasta (5,79%), mengurus rumah tangga (13,21%), Wiraswasta (2,63%), petani (1,95%) dan pegawai negeri sipil (1,32%). Data pilah berdasarkan status perkawinan ; kawin (23,81%), belum kawin (18,98%), cerai mati (4,43%) dan cerai hidup (1,10%) (Kalurahan Wedomartani, 2017)

Data pilah anak berdasarkan usia dibagi pada rentang usia 0-5 tahun, 6-12 tahun dan 13-18 tahun. Data secara lengkap disajikan pada Gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2. Data Pilah Anak di Kalurahan Wedomartani

Sumber : Laporan DRPPA Kalurahan Wedomartani, Tahun 2023 (Wedomartani, 2023)

2.3. Peraturan Desa Tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Kalurahan Wedomartani belum mempunyai Peraturan Desa yang khusus memuat desa ramah perempuan dan peduli anak. Akan tetapi, Kalurahan ini sudah mempunyai regulasi yang mendukung program DRPPA di antaranya ;

- Peraturan Kalurahan Wedomartani Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
- SK Lurah Wedomartadi Nomor 70.2 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD;
- SK Lurah Wedomartadi Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pengurus Karang Taruna Parikesit Wedomartani Periode 2022 -2027;
- SK Kepala Desa Wedomartani Nomor 101.2 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Wedomartani Periode 2021 – 2023;

- SK Kepala Desa Wedomartadi Nomor 91.4 Tahun 2021 tentang Pengurus Forum Anak Desa Wedomartani Masa Bakti 2021-2023
- SK Lurah Wedomartadi Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
- SK Lurah Wedomartani Nomor 98 Tahun 2020 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Masa Bhakti 2020 – 2026
- SK Kepala Desa Wedomartadi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Desa Prima Kartini
- SK Kepala Desa Wedomartani Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Anti Narkoba Wedo Waspadha; SK Kepala Desa Wedomartadi Nomor 100 Tahun 2017
- SK Camat Ngemplak Nomor 05.B/SK.Cam/2018 tentang Tim Pelaksana Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak (FPK2PA) Kecamatan Ngemplak;
- SK Kepala Desa Wedomartani Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pengurus Sanggar Seni Budaya Desa Wedomartani
- SK Kepala Desa Wedomartani Nomor 86 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Wedomartani;

2.4. Pembiayaan Desa untuk Program DRPPA

Tahun 2021, pada saat Kalurahan wedomartani menjadi lokasi *pilot project*, anggaran untuk program DRPPA disediakan juga dari KemenPPA sekitar Rp 5-10 juta rupiah. Pada tahun-tahun selanjutnya, Kalurahan Wedomartani sudah mengalokasikan anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari beberapa sumber anggaran. seperti dana desa, pendapatan bagi hasil maupun dana keistimewaan DI Yogyakarta.

Pada APBKal pada Tahun 2023 Kalurahan Wedomartani sudah mengalokasikan anggaran untuk program DRPPA sekitar 6,6% dari total belanja Rp 7.406.153.874 (Peraturan Kalurahan Wedomartani Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, 2024). Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan program DRPPA untuk menjaga keberlangsungan program tersebut (Tabel 2).

Tabel 2. Anggaran Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kalurahan Wedomartani Tahun 2023

No	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	DDS	50.355.000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	DDS	57.920.000
3	Penyelenggaraan Posyandu	DDS	79.185.000

No	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran
4	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan	DDS	66.935.000
5	Penyelenggaraan Festival/Lomba kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa (Pondes)	DDB	48.700.000
6	Pembinaan Karang Taruna	PBH	34.285.000
7	PKK	DDS	31.712.500
8	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel	DAIS	26.785.000
9	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin	DAIS	36.400.000
10	Pelatihan & Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	DAIS	45.080.000
Jumlah			477.357.500

Sumber : Laporan DRPPA Kalurahan Wedomartani, Tahun 2023 (Wedomartani, 2023)

2.5. Keterwakilan Perempuan di Struktur Desa/Kelurahan, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Kalurahan Wedomartani membuka kesempatan bagi perempuan untuk turut aktif dalam pemerintahan desa dan pembangunan. Perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri menjadi bagian dari organisasi pemerintahan di desa. Keterwakilan perempuan di Kalurahan Wedomartani ada 11 orang dari 55 orang pegawai (20%) sebagaimana terlihat di Tabel 3. Rekrutmen aparatur kalurahan dilakukan secara terbuka, semua masyarakat berhak untuk mendaftar dan mengikuti tes sesuai tahapan. Kompetisi dilakukan secara *fair* sehingga siapa pun yang menjadi aparatur kalurahan adalah orang-orang terpilih sesuai kapasitas.

Tabel 3. Keterwakilan Perempuan di Kalurahan Wedomartani

No	Nama	Jabatan
1	Wahyuni Yudastuti, S.Pd	Anggota BPKalurahan
2	Wiji Rahayuningsih	Kaur Danarto
3	Sri Yatun	Staf
4	Atik Yuniarti	Staf
5	Ismiyati, S.Pd.	Staf
6	Desi Sri Rahayu, S.Pd	Staf
7	Helda Septiyaningrum	Staf
8	Inna Rahmatul"Ulya	Staf
9	Siti Aisyah	Dukuh
10	Tri Suci Triliyantuti, SH	Dukuh
11	Putri Hermawati, S.Pd	TPSK

Sumber : Laporan DRPPA Kalurahan Wedomartani, Tahun 2023 (Wedomartani, 2023)

2.6. Perempuan Wirausaha

Kelompok perempuan wirausaha bernaung pada lembaga desa yaitu Desa prima, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Desa Preneur dan Forum UMKM

merupakan kelompok perempuan wirausaha yang membuat kesepakatan untuk bersama-sama membuat dan menjalankan program, misalnya membuat makanan khas tradisional.

2.7. Pengasuhan Berbasis Hak Anak

Pengasuhan berbasis hak anak di Kalurahan Wedomartani dilakukan melalui berbagai lembaga, seperti Layanan Puspaga, Kelompok Keluarga Pelopor dan Pelapor, Kelompok Bermain/PAUD, serta Tempat Penitipan Anak Ramah ASI dan Ruang Bermain Anak. Secara khusus, Kalurahan Wedomartani mewajibkan semua Tempat Penitipan Anak dan PAUD untuk menerapkan kebijakan ramah ASI. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa setiap anak tetap mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan mereka. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik dari segi mental maupun intelektual.

2.8. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Untuk mengatasi masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kalurahan Wedomartani telah menerapkan langkah-langkah preventif yang ketat, khususnya bagi calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri. Proses pencegahan dimulai dengan melakukan screening menyeluruh untuk memastikan keaslian dan keabsahan seluruh dokumen yang diperlukan. Dalam upaya mencegah pemalsuan dokumen, terutama bagi pasangan suami-istri, pemerintah mewajibkan kehadiran kedua belah pihak selama proses verifikasi. Sebagai contoh, jika seorang suami berencana bekerja ke luar negeri, istrinya juga harus hadir untuk menandatangani dokumen persetujuan secara langsung di hadapan petugas. Dokumen ini kemudian disahkan melalui berita acara yang ditandatangani di hadapan petugas dan dibubuhi materai untuk memastikan keabsahan hukum dan mengurangi risiko pemalsuan.

Selain verifikasi dokumen, calon tenaga kerja juga diberikan pemahaman mendalam mengenai risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul selama bekerja di luar negeri. Penjelasan ini memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dengan lebih matang dan bijak. Pendekatan ini merupakan salah satu strategi utama Kalurahan Wedomartani untuk meminimalisir kasus TPPO, sekaligus memastikan bahwa proses pengiriman tenaga kerja dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melindungi hak-hak tenaga kerja.

2.9. Tidak Ada Pekerja Anak

Kalurahan Wedomartani, melalui Rumah DataKu, secara cermat memantau berbagai aspek, termasuk data terkait pekerja anak. Berdasarkan data yang tersedia, mayoritas anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan di wilayah ini bukanlah pekerja yang mendapatkan upah,

melainkan mereka membantu orang tua mereka dengan tugas-tugas ringan seperti memberi makan ternak, mencari rumput, dan kegiatan serupa. Saat ini, angka pekerja anak resmi tercatat tetap berada di angka 0, yang menunjukkan bahwa tidak ada anak yang terlibat dalam pekerjaan formal untuk mendapatkan upah. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap dijaga untuk memastikan kondisi ini terus berlanjut. Pengawasan dan pencatatan data yang akurat menjadi kunci dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya pekerja anak yang tidak sesuai dengan regulasi.

2.10. Tidak Ada Anak yang Menikah di Bawah Usia 19 Tahun (Perkawinan Usia Anak)

Salah satu masalah utama yang dihadapi di Kalurahan Wedomartani adalah dampak negatif dari pembelajaran daring, yang menyebabkan anak-anak lebih sering menggunakan perangkat seperti ponsel. Sebelum pandemi, anak-anak dilarang membawa ponsel ke sekolah untuk mengurangi gangguan dan membatasi akses ke media sosial. Namun, dengan peralihan ke pembelajaran daring, anak-anak kini memiliki akses yang lebih besar ke media sosial, yang mulai mempengaruhi perilaku mereka. Kondisi ini menekankan pentingnya pengawasan orang tua untuk memastikan bahwa waktu luang anak-anak dihabiskan dengan cara yang positif dan produktif, sehingga mereka terhindar dari pengaruh buruk yang mungkin muncul dari penggunaan media sosial yang tidak terkendali.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Kapasitas

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta laporan dari Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, terdapat beberapa poin penting yang perlu dianalisis terkait kasus kekerasan seksual di daerah tersebut. Di antaranya terkait dengan peningkatan kasus kekerasan seksual yang terus meningkat di Gresik mengakibatkan banyaknya perempuan yang merasa khawatir. Namun demikian, beberapa dinas terkait seperti KBPPPA dan P2TP2A melakukan prosedur penanganan secara ketat agar setiap kasus bisa tertangani dengan baik. Pendampingan terhadap korban seperti medis, hukum dan psikologi dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan hak korban atas perlindungan. Selain itu, kasus yang ditangani dipastikan terselesaikan dengan baik sampai korban benar-benar pulih. Apabila korban merasa masih perlu pendampingan, maka kasus akan terus didampingi sampai tuntas.

Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk menjadikan sesuatu yang adil dan beradab menjadi lebih efektif dalam seluruh aspek kehidupan (Karwati, 2017). Pemberdayaan perempuan merupakan proses untuk meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kapasitas sehingga perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, program kesehatan dan pendidikan, serta mempromosikan kesetaraan gender

dan perlindungan anak (Bilpatria, 2017). Pemberdayaan perempuan merupakan proses peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi termasuk pengambilan keputusan, serta tindakan transformatif yang menghasilkan peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (R. Hermawan, 2011). Upaya pengembangan kapasitas perempuan mengarah pada pemberdayaan perempuan untuk meraih potensi dan mempengaruhi perubahan positif di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Melalui pengembangan kapasitas, perempuan dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, program kesehatan dan pendidikan, serta mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Pengembangan kapasitas meliputi tiga tingkatan yaitu (a) tingkat individu, meliputi : pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika, (b) tingkat kelembagaan, meliputi: sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan, dan (c) tingkat sistem meliputi: peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukung (Bilpatria, 2017; Prawitno & Alam, 2015).

Hubungan antara tingkat individu, kelembagaan, dan sistem bersifat saling terkait dan saling memengaruhi secara sinergis. Individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika yang baik akan mendukung kelembagaan organisasi. Sebaliknya, kelembagaan yang kuat dengan sumber daya yang memadai, tata laksana organisasi yang efektif, struktur organisasi yang jelas, dan sistem pengambilan keputusan yang baik dapat meningkatkan kapasitas individu. Di tingkat sistem, peraturan perundang-undangan dan kebijakan akan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan individu dan kelembagaan.

Upaya pengembangan kapasitas, dalam hal ini kapasitas perempuan mengarah pada pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan potensi perempuan sehingga dapat memberikan perubahan positif di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan merupakan proses peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi termasuk pengambilan keputusan, pengawasan, dan perluasan serta tindakan transformatif yang menghasilkan peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (E. Hermawan, 2023). Perempuan dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan pada berbagai sektor termasuk ekonomi, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Riyadi menekankan pengembangan kapasitas pada aspek pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokan kerja dan motivasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Leavitt yang menekankan pada pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika. Sementara Kamariah menekankan pada *knowledge, ability* dan *interest* (Bilpatria, 2017). Pengembangan kapasitas perempuan dalam hal pengetahuan, keterampilan, kapasitas dan motivasi pada

hakikatnya merupakan pemberdayaan perempuan sehingga mereka mau terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Perempuan mempunyai posisi yang sama dan sejajar dengan laki-laki sehingga semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Kepemimpinan dan keterlibatan pimpinan dapat memastikan terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan desa.

Untuk mencapai hal tersebut, terdapat 8 prinsip pemberdayaan perempuan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat keberhasilan pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Kalurahan Wedomartani yaitu kesetaraan gender, afirmasi, pemberdayaan, partisipasi, non-diskriminasi, inklusif, transparansi dan akuntabilitas serta keberlanjutan (Ascholani, 2020).

3.1. Kesetaraan Gender

Dalam prinsip ini, semua kegiatan dalam program DRPPA harus fokus pada pencapaian keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dalam memenuhi indikator pertama mengenai pengorganisasian perempuan dan anak, perempuan telah diakui keberadaannya dan diberdayakan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Sebagian besar organisasi di Kalurahan Wedomartani secara aktif memberdayakan perempuan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan organisasi mereka sendiri. Contohnya, dalam program PRSE, pimpinan dan pengurus PRSE memanfaatkan dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberdayakan anggotanya melalui pelatihan dan pemberian modal. Dengan pendekatan ini, perempuan tidak hanya mendapatkan keterampilan baru, tetapi juga kesempatan untuk mengaplikasikannya secara efektif, mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisasi serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Seluruh organisasi termasuk organisasi perempuan mendapatkan dukungan dana dari Kalurahan Wedomartani. Hal ini dibuktikan pada anggaran yang disediakan ada Tahun 2023. Dari total anggaran DRPPA, terdapat anggaran pemberdayaan khusus pemberdayaan perempuan dan anak sebesar Rp 76.794.500 (17,09 %) (Tabel 4). Hal ini menunjukkan perhatian dari pemerintah Kalurahan Wedomartani untuk memperhatikan pemberdayaan perempuan,

3.2. Afirmasi

Peningkatan keterwakilan perempuan sebagai upaya untuk memastikan jumlah perempuan yang menduduki posisi di pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa minimal 30% dari jumlah kepengurusan (KemenPPA, 2021). Pada umumnya, pembangunan desa masih menghadapi tantangan dalam

mencapai kesetaraan gender, sehingga sering kali diharapkan menerapkan kebijakan afirmatif, seperti memberikan kuota perempuan untuk posisi aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di Kalurahan Wedomartani, kebijakan afirmatif ini tidak menjadi prioritas mendesak karena desa ini telah menerapkan sistem rekrutmen dan seleksi aparatur pemerintahan yang terbuka dan transparan. Perempuan dan laki-laki di Kalurahan Wedomartani memiliki posisi dan kedudukan yang sama sehingga keduanya memiliki kesempatan yang setara untuk mendaftarkan diri dan terlibat dalam pemerintahan desa. Tidak ada kebijakan afirmatif khusus untuk perempuan di sini, melainkan kesempatan yang sama untuk semua individu. Ini merupakan salah satu kelebihan Kalurahan Wedomartani, di mana semua pihak dapat bersaing secara sehat berdasarkan kapasitas dan kapabilitas mereka. Saat ini, terdapat 11 orang perempuan dari 55 pegawai, yang mencerminkan keterwakilan perempuan sebesar 20%, menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama benar-benar diterapkan dalam struktur pemerintahan desa.

3.3. Pemberdayaan

Fasilitasi pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan di Kalurahan Wedomartani yang diadakan oleh pihak eksternal sudah banyak dilakukan. Misalnya pada Tahun 2017, Satgas PATBM (pada Tahun 2021 terpecah menjadi Satgas PPA dan PUSPAGA) menerima bimtek dari KemenPPA bekerja sama dengan Yayasan Sekretariat anak Merdeka Indonesia (SAMIN), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang *concern* untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua masyarakat adat di Indonesia), RIFKA ANISA (Organisasi non pemerintah di Yogyakarta yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan) maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman. Perempuan di Kalurahan wedomartani diberikan pendidikan dan pelatihan untuk membuat modul tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Setelah itu, organisasi perempuan di Kalurahan ini mengadakan sosialisasi ke seluruh padukuhan untuk menyampaikan informasi terkait 5 Cluster hak anak sebagai bagian dari perlindungan anak yaitu (1) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan (5). Klaster Perlindungan Khusus.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan perempuan sebagai inisiatif Kalurahan Wedomartani juga sudah kontinyu dilakukan. Desa selalu memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan. Pada Tahun 2023, dari total APBDes Pemerintah Kalurahan

Wedomartan Rp 7.406.153.874,- terdapat beberapa kegiatan yang khusus untuk pemberdayaan perempuan sebanyak 6,6%. Pada Tahun 2024 kegiatan pemberdayaan perempuan masuk ke dalam sub bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga pada APBDes Pemerintah Kalurahan Wedomartani sebanyak Rp 91.515.000,00 (Tabel 4).

Tabel 4. Alokasi Anggaran untuk Pemberdayaan Perempuan di Kalurahan Wedomartani Tahun 2023 -2024

No	Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	45.080.000	29.485.000
2	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	26.785.000	20.110.000
3	Pembinaan dan pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, masyarakat miskin	36.400.000	21.810.000
4	Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat desa	30.645.000	20.110.000

Sumber : (Peraturan Kalurahan Wedomartani Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, 2024; Peraturan Kalurahan Wefomartani Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024,)

3.4. Partisipasi

Pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wedomartani membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam perumusan kebijakan desa. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa selalu mengikutsertakan perwakilan perempuan dari seluruh RT/RW yang tergabung dalam organisasi perempuan seperti PKK, KWT, Difabel, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan organisasi lainnya. Selain itu Musrenbang desa juga mengundang organisasi kemasyarakatan perempuan misalnya, Aisyiah dan Fatayat Nahdatul Ulama untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan perempuan dari berbagai latar belakang terwakili dalam proses pembangunan desa.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Wedomartani dipresentasikan kepada seluruh undangan yang hadir dalam forum musyawarah. Setelah pemaparan tersebut, setiap perwakilan organisasi, termasuk organisasi perempuan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan pendapat terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses diskusi memastikan bahwa semua suara terdengar dan berbagai perspektif dipertimbangkan. Setelah semua masukan diterima dan dievaluasi, RAPBKal dapat disahkan secara resmi melalui Peraturan Kalurahan sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Wedomartani.

3.5. Non-Diskriminasi

Pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wedomartani dilakukan dengan prinsip non-diskriminasi, memastikan bahwa setiap perempuan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari berbagai program. Semua kegiatan pemberdayaan dirancang untuk melibatkan perempuan dari semua lapisan masyarakat secara setara, memberikan mereka akses yang adil terhadap pelatihan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka.

Dalam setiap program dan kegiatan, prinsip non-diskriminasi ditegakkan dengan memastikan bahwa perempuan, baik yang aktif dalam organisasi maupun yang tidak terlibat, dapat menyampaikan aspirasi, usulan, dan keluhan mereka tanpa adanya hambatan. Dengan pendekatan ini, Kalurahan Wedomartani berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana setiap perempuan memiliki ruang untuk berkembang, berkontribusi, dan merasakan manfaat dari pemberdayaan yang dilakukan secara adil dan merata.

3.6. Inklusif

Semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wedomartani dirancang untuk mengakomodasi setiap kelompok perempuan yang ada di desa. Ini mencakup perhatian terhadap berbagai aspek seperti umur, jenjang pendidikan, disabilitas, agama, serta kelompok lainnya. Dengan pendekatan yang inklusif ini, setiap perempuan, tanpa terkecuali, diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya, dan berkontribusi dalam proses pemberdayaan. Kalurahan Wedomartani berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemberdayaan perempuan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak semua kelompok, menciptakan lingkungan yang adil dan mendukung untuk semua..

3.7. Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip yang dijunjung tinggi oleh Kalurahan Wedomartani. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang desa, di mana perempuan diberikan peran dan kesempatan penuh untuk menyampaikan usulan terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Perwakilan dari berbagai organisasi perempuan diundang untuk hadir, memberikan masukan dan memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka terakomodasi.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wedomartani dapat diakses oleh semua perempuan. Mereka diberikan ruang terbuka untuk menyampaikan keluhan dan usulan terkait berbagai kegiatan. Melalui program seperti PRSE atau Desa Prima, berbagai

organisasi memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan untuk meningkatkan pendapatan, sehingga mereka dapat menopang kebutuhan keluarganya dengan lebih baik. Di sisi lain, PUSPAGA dan Satgas PPA menjalankan peran mereka masing-masing dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh tim dengan berpegang teguh pada etika kerja yang mengutamakan kerahasiaan klien. Komitmen ini memastikan setiap perempuan merasa aman dan terlindungi, serta didukung dalam proses pemberdayaan dan perlindungan yang dilakukan

3.8. Keberlanjutan

Masyarakat Kelurahan Wedomartani, termasuk kalangan perempuan, semakin menyadari pentingnya peran dan posisi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap program atau kegiatan harus dijalankan karena memberikan dampak positif bagi seluruh anggota masyarakat. Keberlanjutan program menjadi prioritas utama karena manfaat jangka panjang dapat tercapai. Peran media sosial, kepemimpinan yang visioner, partisipasi aktif aparat desa dan dukuh-dukuh muda, serta dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penentu. Semua elemen ini menciptakan sinergi yang kuat dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan delapan prinsip pemberdayaan perempuan di atas, pemerintahan Kelurahan Wedomartani sudah memperhatikan dan memfasilitasi perempuan dalam berbagai program pemberdayaan perempuan dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan dan organisasi kemasyarakatan perempuan. Fasilitasi ini juga didukung oleh anggaran yang memadai dari pemerintahan Kelurahan Wedomartani.

Pada prinsipnya, perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas. Perempuan dan laki-laki juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri dan ikut terlibat aktif dalam struktur organisasi pemerintahan di Kelurahan Wedomartani. Tidak ada diskriminasi yang muncul di dalam masyarakat. Semuanya mempunyai hak yang sama. Kondisi ini dibangun agar tetap terjaga keberlangsungannya dengan komitmen pimpinan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan pada penelitian ini bahwasannya tahapan yang dilakukan oleh tim P2TP2A Kabupaten Gresik dalam menangani kasus pengaduan korban kekerasan seksual mengacu pada UUD Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) dan (2). Dalam memfasilitasi korban kekerasan seksual tim P2TP2A juga melakukan pendampingan yang bisa dianggap cukup baik hal ini karena dapat dilihat bahwa tim P2TP2A melakukan pendampingan hingga korban dapat

dinyatakan sepenuhnya pulih. Dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang masih perlu untuk diteliti lebih dalam lagi. Kelemahan dalam pengumpulan data menjadi salah satu kekurangan yang paling utama, hal ini dikarenakan dari Dinas KBPPPA memiliki kode Etik tersendiri terkait kasus kekerasan seksual sehingga tidak semua informasi bisa didapatkan.

Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pengembangan metodologi pengumpulan data yang lebih komprehensif dan transparan, mengingat kelemahan dalam pengumpulan data yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Hal ini dapat mencakup penggunaan alat survei yang lebih efektif dan pelatihan bagi petugas dalam teknik wawancara sensitif untuk studi kasus pada isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual di mana perlu adanya kepastian keamanan dan perlindungan kerahasiaan data yang diberikan.

5. Referensi

- Aryatie, I. R., Thalib, P., & Usanti, T. P. (2022). Pendampingan Hukum Tentang Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Madiun. *Janaloka Jurnal*, 2(1), 139–155.
- Ascholani, C. Panduan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan di Desa. , Kompak § (2020).
- Azizah, R. N., Luaylik, N. F., Saputri, E., & Pamekasan, K. (2023). *Model Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan*. 07(02), 280–293.
- Bilpatria, L. O. (2017). *Dimensi Capacity Building Perempuan dalam Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek*. Universitas Airlangga.
- Hermawan, E. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Partisipatif Membawa Pembangunan Pada Masyarakat Desa. *Distingsi : Journal Og Digital Society*, 1(2).
- Hermawan, R. (2011). Natural language processing with python. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*. <https://doi.org/10.17509/ijal.v1i1.106>
- Indonesia, K. P. P. D. P. A. R. *Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak*. , (2021).
- Karwati, L. (2017). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 45–52. <https://doi.org/10.21009/JIV.1201.5>
- KemenPPA. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Daerah Perempuan dan Layanan Anak Tahun 2023. , Kemenppa § (2023).
- KEMENPPPA. (2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Retrieved April 24, 2020, from Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak website: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2646/pentingnya-peran-perempuan-sebagai-kekuatan-bangsa-perangi-covid-19>

- Khusna, F. A., & Sari, R. (2024). Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Budaya Lokal: Studi Kasus Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pangan Lestari. *JAS: Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.73451>
- Luthfitah, D. A. S., Nurhadi, N., & Parahita, B. N. (2023). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Sukoharjo. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 4(3), 446–463. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i3.3927>
- Morrison, T. (2003). Actionable Learning: a Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning. In *Asian Development Bank Institute* (Vol. 30).
- Nur, S. (2016). Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *Jurnal IAIN Bone*, 1–23.
- Nurazizah, A. M. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Bank Sampah Ngudi Makmur Dusun Serut. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.13051>
- Nurlatifah, D. A., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Proses Pemberdayaan Perempuan pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta). *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9463>
- Perempuan, K. P. (2001). *Pemantapan Kesepakatan Mekanisme Operasional Pengarusutamaan Gender Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional dan Daerah: Bagian I dan II*. Jakarta.
- Pranyoto, V. S. (2020). Sleman terima penghargaan KPPI atas komitmen dalam perlindungan anak. Antara Kantor Berita Indonesia. Retrieved from antaranews website: <https://www.antaranews.com/berita/1626278/sleman-terima-penghargaan-kpai-atas-komitmen-dalam-perlindungan-anak>.
- Prawitno, A., & Alam, A. S. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2). Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/110>
- Puspaningrum, D., & Sunartomo, A. F. (2022). Desa Ramah Perempuan: Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa Sumberpakem dalam Implementasi SDG's. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(2), 211–219. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i2.58>
- Solehudin, H., Andriyanto, & Alfirdaus, Z. (2023). Pengembangan Kapasitas Kaum Perempuan Melalui Coaching Femalepreneur di Kabupaten Trenggalek. *Media Bina Ilmiah*, 17(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.33578/mbi.v17i8.339>
- Wedomartani, L. (2023). *Laporan Pelaksanaan DRPPA Tahun 2023 Kelurahan Wedomartani*.
- Zulfikar, A. (2023). Jadi Model Program DRPPA, Desa Wedomartani Berdayakan Perempuan Serta Lindungi Anak dari Kekerasan. Retrieved July 7, 2024, from tribunnews.com website: <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/07/07/jadi-model-program-drppa-desa-wedomartani-berdayakan-perempuan-serta-lindungi-anak-dari-kekerasan>